

# IMPLEMENTASI FUNGSI KOORDINASI PEMERINTAHAN PADA KANTOR DISTRIK ALAMA KABUPATEN MIMIKA

Oleh :  
Eneas Mulugol<sup>1</sup>  
Arpi .R.Rondonuwu<sup>2</sup>  
Ventje Kasenda<sup>3</sup>

## Abstrak

Implementasi Fungsi Koordinasi Pemerintahan Pada Kantor Distrik Alama Kabupaten Mimika Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi. Pembimbing : (I) Drs.Arpi .R.Rondonuwu,MSi (II) Drs.V.Kasenda,MSi .Permasalahan yang terlihat dalam pelaksanaan pemerintahan di Distrik Alama adalah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Distrik masih kurang baik, hal ini akan berpengaruh secara negatif terhadap pelaksanaan tugas-tugas organisasi, sehingga menghambat usaha pencapaian tujuan. Kepala Distrik diharapkan dapat mengkoordinir bawahan dalam meningkatkan kinerja aparat pemerintah Distrik terutama dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah distrik Alama.Tujuan penelitian ; Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi koordinasi pemerintahan di Kantor Distrik Alama Kabupaten Mimika. Pada dasarnya koordinasi adalah merupakan usaha dari seorang pemimpin suatu organisasi untuk menempatkan secara teratur bagian-bagian atau unit-unit kerja yang ada dalam organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Imam Buchari (1970 : 68) mengemukakan tujuan koordinasi sebagai berikut : untuk mencegah konflik, untuk mencegah persaingan, mencegah double ours dan pemborosan, mencegah kekosongan ruang atau waktu, mencegah perbedaan-perbedaan pendekatan dan pelaksanaan.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, analisis data dilakukan dengan menggambarkan secara deskriptif kualitatif tentang pelaksanaan fungsi koordinasi pemerintahan di Kantor Distrik Alama. Kepala Distrik bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Distrik. Kepala Distrik memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan koordinasi untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah Distrik terutama dalam pelayanan masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan koordinasi pemerintahan di Kantor Distrik Alama 5 orang informan menyatakan sangat baik; 3 orang menyatakan cukup baik dan 2 orang informan menyatakan kurang baik pelaksanaan koordinasi pemerintahan di Kantor Distrik Alama dalam pelaksanaan pemerintahan Distrik Alama.

Distrik Alama dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Distrik masih perlu terus ditingkatkan pelaksanaan koordinasi pemerintahan terutama oleh Kepala Distrik dan para perangkat distrik, hal ini akan berpengaruh secara positif terhadap pelaksanaan tugas-tugas organisasi sehingga tidak menghambat usaha pencapaian tujuan. Kepala Distrik diharapkan dapat mengkoordinir bawahan dalam meningkatkan kinerja aparat pemerintah Distrik dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah distrik Alama.

***Kata Kunci : Implementasi, Koordinasi, Pemerintahan***

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Prog. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

<sup>2</sup> Tenaga Pendidik Pada Prog. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

<sup>3</sup> Tenaga Pendidik Pada Prog. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

## **PENDAHULUAN**

Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di Distrik, Kepala Distrik bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Distrik. Kepala Distrik memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja aparat pemerintah Distrik terutama dalam pelayanan masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah.

Selaku Kepala Distrik, Kepala Distrik harus melakukan fungsi manajemen dengan baik agar pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik. Secara teoritis banyak faktor yang berperan atau berfungsi dalam mewujudkan kinerja organisasi yang efisien dan efektif, baik langsung maupun tidak langsung. Salah satu faktor yang penting ialah faktor manajemen daripada organisasi itu sendiri, karena manajemen adalah menyangkut pengendalian manusia termasuk sumber-sumber yang dimiliki untuk dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan proses administrasi untuk mencapai tujuannya (Dann Sugandha, 1989). Pelaksanaan manajemen secara efektif dapat menjamin terwujudnya kinerja organisasi sesuai yang diharapkan. Fungsi koordinasi dapat dilihat sebagai fungsi manajemen yang berperan menciptakan atau mewujudkan kinerja organisasi yang diharapkan.

Koordinasi merupakan usaha yang mengarahkan dan menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan kerja organisasi sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena semakin kompleks kelompok-kelompok manusia yang dipimpin dan semakin lebih rumit usaha yang harus ditangani, maka semakin lebih dibutuhkan pelaksanaan koordinasi pemerintahan. Suatu permasalahan yang terlihat dalam

pelaksanaan pemerintahan di Distrik Alama adalah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Distrik masih kurang baik, hal ini akan berpengaruh secara negatif terhadap pelaksanaan tugas-tugas organisasi, sehingga menghambat usaha pencapaian tujuan. Kepala Distrik Alama bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan di distrik, hal ini Kepala Distrik diharapkan dapat mengkoordinir bawahan dalam meningkatkan kinerja aparat pemerintah Distrik terutama dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah distrik Alama.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapatlah dibuat perumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana pelaksanaan fungsi koordinasi pemerintahan di Kantor Distrik Alama Kabupaten Mimika ? Tujuan penelitian ini : Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi koordinasi pemerintahan di Kantor Distrik Alama Kabupaten Mimika.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Implementasi**

Pressman dan Wildavsky dalam Solichin Abdul Wahab (1991: 51) menyatakan bahwa sebuah kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait langsung dengan kata benda kebijaksanaan. Sehingga bagi kedua pelopor studi implementasi ini maka proses untuk melaksanakan kebijaksanaan perlu mendapatkan perhatian yang saksama, dan oleh sebab itu adalah keliru kalau kita menganggap bahwa proses tersebut dengan sendirinya akan berlangsung mulus. Agak mirip dengan pandangan kedua ahli di atas, Van Meter dan Van Horn merumuskan proses implementasi ini sebagai "those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions" (tindakan-tindakan yang

dilakukan baik oleh individu-individu / pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang dikutip dari Solichin Abdul Wahab (1991 : 51) bahwa : memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat /dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Berdasarkan pandangan yang diutarakan oleh kedua ahli tersebut di atas dapatlah kita simpulkan bahwa proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program. dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan (intended) maupun yang tidak diharapkan (spillover/negative effects). Dari pandangan yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier di atas terlihat pula bahwa antara apa yang disebut sebagai perumusan kebijaksanaan dan implementasi kebijaksanaan tidak dianggap sebagai suatu hal yang terpisah, sekalipun mungkin secara analitis, bisa saja dibedakan.

### **Konsep Koordinasi**

Drs. The Liang Gie (1981:160) mendefinisikan pengkoordinasian sebagai : menghubungkan-hubungkan, menyatupadukan dan menyelaraskan orang-orang dan pekerjaannya sehingga semuanya berlangsung secara tertib dan seirama menuju ke arah tercapainya tujuan tanpa terjadi

kekacauan, percekocokan, kekembaran atau kekosongan kerja.

Prof. Drs. R.S. Tangkudung ((1983:106) mengutip pendapat dari :

- Dr. Panglaykim dan Drs. Hazil mengatakan bahwa koordinasi dapat diartikan sebagai pengaturan yang tertib dari kumpulan/gabungan usaha, untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama.
- James D. Mooney mengatakan koordinasi adalah :

"The orderly arrangement of group effort, to provide unity of action in the pursuit of a common purpose" (koordinasi adalah penataan usaha sekelompok orang secara tertib untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mengusahakan tercapainya tujuan bersama.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas maka dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya koordinasi adalah merupakan usaha dari seorang pemimpin suatu organisasi untuk menempatkan secara teratur bagian-bagian atau unit-unit kerja yang ada dalam organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Imam Buchari (1970 : 68) mengemukakan tujuan koordinasi sebagai berikut :

1. Koordinasi untuk mencegah konflik.
2. Koordinasi untuk mencegah persaingan.
3. Koordinasi untuk mencegah double ours dan pemborosan.
4. Koordinasi untuk mencegah kekosongan ruang atau waktu.
5. Koordinasi untuk mencegah perbedaan-perbedaan pendekatan dan pelaksanaan.

Pada akhirnya Prof. Drs. R.S. Tangkudung (1983:107) menarik kesimpulan bahwa koordinasi bertujuan untuk menghindarkan adanya kesimpang siuran, konflik antara bagian-bagian atau unit-unit, adanya pekerjaan yang kembar, ataupun timbulnya

kekosongan kerja dan pencegahan kegiatan-kegiatan yang tak perlu guna mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya dikatakan

bahwa koordinasi pada umumnya berintikan pada :

- a. Untuk menciptakan kesatuan tindakan agar tertib.
- b. Untuk menghasilkan keselarasan tindakan.
- c. Untuk mendapatkan keserasian dan keseimbangan.
- d. Untuk menyatukan dan menyelaraskan.
- e. Untuk mendapat kesatuan usaha.

### **Konsep Pemerintah dan Pemerintahan**

Dr. Pamudji, MPA (1987 : 22) memberikan pengertian sebagai berikut : secara etimologis, Pemerintahan berasal dari kata perintah menurut kamus kata-kata tersebut mempunyai arti sebagai berikut :

- a. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.
- b. Pemerintah adalah kekuasaan suatu negara (daerah-daerah) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara.
- c. Pemerintahan adalah suatu perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya), dalam hal memerintah.

Drs. Sumber Saparin (1986:21), mengemukakan bahwa untuk dapat membedakan kedua pengertian tersebut perlu diterangkan menurut segi etimologis yaitu :

- a. Pemerintah ialah kata nama subyek berdiri sendiri.

Contoh : Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, dan sebagainya.

- b. Pemerintahan adalah kata jadian, yang disebabkan karena subyek mendapat akhiran "an". Artinya pemerintah sebagai subjek melakukan tugas/kegiatan. Sedangkan cara melakukan tugas/kegiatan itu disebut sebagai pemerintahan. Tambahan akhiran dapat juga diartikan sebagai bentuk jamak atau dapat berarti lebih dari satu pemerintah.

Pemerintah dalam arti sempit menunjukkan kepada aparat negara, organ atau alat-alat perlengkapan negara yang melaksanakan tugas pemerintahan, dalam arti sempit (eksekutif). Sedangkan Pemerintah dalam arti luas menunjukkan kepada seluruh

perlengkapan negara kesatuan yang melaksanakan kekuasaan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah tugas kewenangan dalam bidang eksekutif saja. Sedangkan Pemerintahan dalam arti luas adalah segala tugas kewenangan dan kekuasaan negara; yang meliputi bidang-bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam penulisan ini pemerintah yang dijadikan kajian adalah Kepada Distrik Alama Kabupaten Mimika.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di depan dan sesuai tujuan yang ingin dicapai, maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Penelitian ini akan memberikan gambaran secara jelas tentang pelaksanaan fungsi koordinasi pemerintahan di Kantor Distrik Alama Kabupaten Mimika.

Fokus dalam penelitian ini adalah pelaksanaan fungsi koordinasi pemerintahan di Kantor Distrik Alama Kabupaten Mimika. Dalam penelitian ini dilihat dari usaha pemimpin suatu organisasi pemerintahan distrik untuk menempatkan secara teratur bagian-bagian atau unit-unit kerja yang ada dalam organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang bertujuan untuk menghindarkan adanya kesimpang siuran, konflik antara bagian-bagian atau unit-unit, adanya pekerjaan yang kembar, ataupun timbulnya kekosongan kerja dan pencegahan kegiatan-kegiatan yang tak perlu guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari Aparat Pemerintah Distrik Alama. Dalam penelitian ini data yang diambil dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu data sukunder dan data primer. Data sukunder adalah data yang bersumber dari kepustakaan (library study), sedangkan data primer adalah data yang bersumber dari lapangan (field research).

Data yang dikumpulkan akan di analisis secara kualitatif. Analisis data dilakukan dengan menggambarkan secara deskriptif tentang pelaksanaan fungsi koordinasi pemerintahan di Kantor Distrik Alama Kabupaten Mimika.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dari data hasil penelitian sesuai dengan indikator-indikator pengukuran pelaksanaan koordinasi pemerintahan dapat dikemukakan pembahasan berikut ini. Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap informan di Distrik Alama terlihat bahwa 5 informan menyatakan sangat baik pelaksanaan koordinasi pemerintahan di Kantor Distrik Alama; 3 orang informan menyatakan cukup baik pelaksanaan koordinasi pemerintahan di Kantor Distrik Alama; 2 orang informan menyatakan kurang baik pelaksanaan koordinasi pemerintahan di Kantor Distrik Alama dalam pelaksanaan pemerintahan Distrik Alama.

Kepala Distrik harus melakukan fungsi manajemen dengan baik antara lain pelaksanaan koordinasi pemerintahan agar pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik. Baiknya pelaksanaan manajemen akan berpengaruh secara positif terhadap kegiatan-kegiatan organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebaliknya manajemen yang kurang baik, akan berpengaruh secara negatif terhadap pelaksanaan tugas-tugas organisasi, sehingga menghambat usaha pencapaian tujuan.

Pelaksanaan pembangunan di Distrik Alama, Kepala Distrik bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Distrik. Kepala Distrik memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan koordinasi untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah Distrik terutama dalam pelayanan masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah.

Distrik Alama dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Distrik masih perlu terus ditingkatkan pelaksanaan koordinasi pemerintahan terutama oleh Kepala Distrik dan para perangkat distrik, hal ini akan berpengaruh secara positif terhadap pelaksanaan tugas-tugas organisasi sehingga tidak menghambat usaha pencapaian tujuan. Kepala Distrik diharapkan dapat mengkoordinir

bawahan dalam meningkatkan kinerja aparat pemerintah Distrik dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah distrik Alama.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Fungsi koordinasi dapat dilihat sebagai fungsi manajemen yang berperan menciptakan atau mewujudkan kinerja organisasi yang diharapkan. Koordinasi merupakan usaha yang mengarahkan dan menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan kerja organisasi sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
2. Baiknya pelaksanaan manajemen akan berpengaruh secara positif terhadap kegiatan-kegiatan organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebaliknya manajemen yang kurang baik, akan berpengaruh secara negatif terhadap pelaksanaan tugas-tugas organisasi, sehingga menghambat usaha pencapaian tujuan.
3. Kepala Distrik harus melakukan fungsi manajemen dengan baik antara lain pelaksanaan koordinasi pemerintahan agar pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan dapat terlaksana dengan baik.
4. Pelaksanaan pembangunan di Distrik Alama, Kepala Distrik bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Distrik. Kepala Distrik memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan koordinasi untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah Distrik terutama dalam pelayanan masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah.
5. Kepala Distrik Alama bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan di distrik, hal ini Kepala

Distrik diharapkan dapat mengkoordinir bawahan dalam meningkatkan kinerja aparat pemerintah Distrik dalam pelaksanaan pemerintahan di wilayah distrik Alama.

6. Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap informan di Distrik Alama terlihat bahwa 5 informan menyatakan sangat baik pelaksanaan koordinasi pemerintahan di Kantor Distrik Alama; 3 orang informan menyatakan cukup baik pelaksanaan koordinasi pemerintahan di Kantor Distrik Alama; 2 orang informan menyatakan kurang baik pelaksanaan koordinasi pemerintahan di Kantor Distrik Alama dalam pelaksanaan pemerintahan Distrik Alama.
7. Distrik Alama adalah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Distrik masih perlu terus ditingkatkan pelaksanaan koordinasi pemerintahan terutama oleh Kepala Distrik dan para perangkat distrik, hal ini akan berpengaruh secara positif terhadap pelaksanaan tugas-tugas organisasi sehingga tidak menghambat usaha pencapaian tujuan.

### Saran-Saran

1. Disarankan agar Kepala Distrik Alama dapat mengkoordinir bawahan dalam meningkatkan kinerja aparat pemerintah Distrik dalam pelaksanaan pemerintahan di wilayah distrik Alama.
2. Kepala Distrik harus lebih meningkatkan pelaksanaan koordinasi untuk menciptakan atau mewujudkan kinerja organisasi yang diharapkan. Hal ini dilaksanakan dengan mengarahkan dan menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan kerja organisasi sehingga perangkat pegawai distrik bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pelayanan masyarakat.
3. Kepala Distrik Alama dalam pelaksanaan pemerintahan perlu terus meningkatkan pelaksanaan koordinasi

pemerintahan terutama terhadap perangkat/pegawai distrik, sehingga pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dapat berjalan dengan lebih baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Allen L.A., 1966. *The Profesional Of Management*, Terjemahan J.M.A. Tuhuteru, Karya Management, P.T. Pembangunan, Jakarta.
- Bhenjamin, H. 2003, *Tinjauan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Kemungkinan Revisi U U No. 22 Tahun 1999*, Jakarta, Makalah..
- Buchari, H. 1995. *Pengawasan Keuangan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kaho Josef Riwuh, 2003. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.
- Koswara, E. 2001., *Otonomi Daerah, Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, Jakarta, Bina Aksara.
- Nawawi, H, 2001, *Metode Penelitian di Bidang Sosial*, Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Moleong, L, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Muslimin A., *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Bandung, Alumni, 1983.
- Pamudji, 1985. *Perbandingan Pemerintahan*, Bina Aksara, Jakarta.
- Purwadarminta, W.J.S. 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Saparin S., 1986. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sarundajang, 1999, *Pemerintahan Daerah Di Berbagai Negara*, Jakarta, Pustaka Sinar.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Jakarta, Kata Hasta.

- \_\_\_\_\_, 2005, Babak Baru : Sistem Pemerintahan Daerah. Jakarta, Kata Hasta.
- Solihin Abdul Wahab, 1991, Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 1985. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, Bina Aksara, Jakarta.
- Sumale, A., 2003, Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Propinsi Papua, Jakarta, Gramedia.
- Surianingrat, Bayu., 1981. Mengenal Ilmu Pemerintahan, Aksara Baru, Jakarta.
- The Liang Gie, 1981. Efisiensi Kerja Bagi Pembangunan Negara, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Tangkudung R. S., 1996. Dasar- Dasar Kepemimpinan, Penerbit Unsrat, Manado.
- Westra, P, (1977), "*Ensiklopedi Administrasi*", Gunung Agung, Jakarta.
- Sumber-Sumber Lain :
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, cetakan 1, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, November, 2005.
  - Undang-Undang No. 12 Tahun 2008, Tentang Pemerintahan Daerah.
  - Undang-Undang No. 21 Tahun 2001, Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua.